

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR : DIPA-013.09.2.409206/2019

I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga	: (013)	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	Kuasa Pengguna Anggaran	:
Unit Organisasi	: (09)	Ditjen Hak Asasi Manusia	Bendahara Pengeluaran	:
Provinsi	: (20)	SULAWESI TENGGARA	Pejabat Penanda tangan SPM	:
Kode>Nama Satker	: (409206)	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI		

Halaman : IA . 1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		239.412.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM		239.412.000
2 Program	013.09.11	Program Pemajuan HAM		239.412.000
Sasaran Program	01	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM		
Indikator Kinerja Program	01.01	Persentase Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan program aksi HAM	40 Persen	
	01.02	Persentase Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan program aksi HAM	20 Persen	
	01.03	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	50 Kab/Kota	
	01.04	Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh Instansi Terkait	50 Rekomendasi	
Output Program	01	kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM		
Indikator Output Program	01	Jumlah Kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	1 kebijakan	
Kegiatan	5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah		239.412.000
Sasaran Kegiatan	01	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		
Indikator Kinerja Kegiatan	01.01	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		
	01.02	jumlah kab/kota peduli HAM		
Sasaran Kegiatan	02	Jumlah Layanan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		
Indikator Kinerja Kegiatan	02.01	Jumlah layanan HAM di wilayah		
Output Kegiatan	5255.001	Layanan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	2,50 Layanan	133.326.000
	5255.001	Layanan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	2,50 Layanan	133.326.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Hak Asasi Manusia di wilayah	1 Layanan	
Output Kegiatan	5255.002	Pembangunan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	2,00 Pemda	106.086.000
	5255.002	Pembangunan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	2,00 Pemda	106.086.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan aksi HAM	1 Pemerintah Daerah	
	02	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1 Kab/Kota	

Jakarta, 5 Desember 2018
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.

Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.09.2.409206/2019
I B. SUMBER DANA**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode>Nama Satker : (409206) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman I B. 1

						Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2019	Rp.	239.412.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	239.412.000			(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
6. SBSN	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

(Dalam Ribuan)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	RpLN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.09.2.409206/2019
II. RINCIAN PENGELUARAN
(RIBUAN RUPIAH)**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode / Nama Satker : (409206) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI
Kewenangan : (KD)

Halaman II.1

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409206	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	-	239.412	-	-	-	239.412		
013.09.11	Program Pemajuan HAM	-	239.412	-	-	-	239.412		
5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	-	239.412	-	-	-	239.412		
5255.001	Layanan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	-	133.326	-	-	-	133.326	20.51	
01	RM	-	133.326	-	-	-	133.326	060	
5255.002	Pembangunan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	-	106.086	-	-	-	106.086	20.51	
01	RM	-	106.086	-	-	-	106.086	060	
	J U M L A H	-	239.412	-	-	-	239.412		

Jakarta, 5 Desember 2018
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.

Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.09.2.409206/2019
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : (409206) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman : III.1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN DANA/PERKIRAAN PENERIMAAN												JUMLAH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	M E I	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	409206	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI														
		RENCANA PENARIKAN DANA	23.941	23.941	23.941	23.941	23.941	23.941	23.941	23.941	23.941	11.971	11.971	11.971	11.971	239.412
		52 BELANJA BARANG	23.941	23.941	23.941	23.941	23.941	23.941	23.941	23.941	23.941	11.971	11.971	11.971	11.971	239.412
	013.09.11.5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	23.941	23.941	23.941	23.941	23.941	23.941	23.941	23.941	23.941	11.971	11.971	11.971	11.971	239.412
		52 BELANJA BARANG	23.941	23.941	23.941	23.941	23.941	23.941	23.941	23.941	23.941	11.971	11.971	11.971	11.971	239.412

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.

Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.09.2.409206/2019
IV. A B L O K I R**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : (409206) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman : IV A.1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.09.2.409206/2019
IV. B C A T A N**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : (409206) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman : IV B.1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : SP DIPA-013.09.2.409206/2019**

A. Dasar :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. xxxx Tahun xxxx tentang APBN TA xxxx (2) dan perubahannya

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara / Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
3. Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
4. Kode>Nama Satker : (409206) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI
- Sebesar : Rp. 239.412.000 (DUA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS DUABELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN

03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.09.11 Program Pemajuan HAM

013.09.11.5255 Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	239.412.000
Rp.	239.412.000

C. Sumber Dana Berasal :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 239.412.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBPNBPN TA Berjalan | Rp. | 0 | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN K E N D A R I (060) Rp. 239.412.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. Petikan DIPA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk Ditjen Hak Asasi Manusia, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Petikan DIPA ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman (digital stamp) sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. Petikan DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam Petikan DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara Petikan DIPA dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. Petikan DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX sampai dengan 31 Desember 2XXX.

DS: 6127-1070-1326-6363

Jakarta, 05 Desember 2018
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001